

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI MELALUI PELATIHAN
PEMBUATAN PUPUK FERMENTASI**

Rohim

Progam Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan
*Email: rohim.annida86@gmail.com

ABSTRAK

Kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnyapun pupuk non subsidi merupakan salah satu permasalahan yang serius dihadapi oleh petani. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari ketergantungan pupuk kimia baik subsidi maupun non subsidi. Pengabdian ini melibatkan serangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam PkM ini yaitu dengan melibatkan secara aktif kelompok tani Sumber rejeki 2 Desa Canghkring Kecamatan jenggawah Kabupaten Jember. Hasil dari PkM yaitu, *kesatu*: merubah mindset petani dari ketergantungan penggunaan pupuk kimia. *Kedua*, menekan biaya produksi pertanian dari sektor pembelian pupuk kimia. *Ketiga*, meningkatkan pendapatan petani. *Keempat*, meningkatkan kesuburan tanah karena pengurangan pupuk kimia yang berlebihan.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Tani, Pupuk Fermentasi.

I. ANALISIS SITUASI

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Bagi negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebesar 275 773,8 ribu jiwa (BPS 2022), masalah pangan bukan hanya merupakan masalah ekonomi tetapi

juga masalah stabilitas dan keamanan. Disamping itu pertanian pun memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia.

Bagi para petani kesejahteraan kehidupan mereka terletak pada komoditas yang mereka tanam. Mulai dari hasil panen yang

melimpah, dan juga harga komoditas yang meraka tanam lebih tinggi dibanding biaya tanam. Disamping itu bagi petani dalam memperoleh kesejahteraan tersebut bukan lah hal yang mudah. Masalah yang sering dihadapi petani terkait dengan kondisi pasar yang belum berpihak kepada petani yang tersirat dalam ideologi pangan murah di Indonesia, dimana petani menjadi korban karena harga jual yang belum menguntungkan. Daya beli yang murah dan biaya produksi yang tinggi ini kerap sekali menjadi topik permasalahan pada petani.

Didalam sektor pertanian ada beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi para petani dalam

bercocok tanam, salah satu faktor yaitu ketersediaan pupuk, Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Masalah ini kerap sekali menjadi hal yang di takuti bagi para petani. Karena keberhasilan dalam bercocok tanam juga dipengaruhi oleh jumlah asupan yang diterima oleh tanaman tersebut. Dalam peningkatan hasil pertanian yang berkualitas, diperlukannya kebutuhan pupuk yang mencukupi. Ketersediaan pupuk yang cukup juga membantu proses pertumbuhan dan kenaikan jumlah pada hasil produksi dengan Pemakaian pupuk yang sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 1. Alokasi pupuk bersubsidi

No.	JAWA TIMUR (TAHUN)	Nama pupuk							
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	ORGANIK CAIR	ORGANIK	JUMLAH
1.	2019	1.074.758	155,499	508,938	590,710	507,404	-	-	2.837.309
2.	2020	967,612	102,990	358,926	600,566	-	-	336,429	2.366.523

3.	2021	948.4	122,	344,	600,	270,71	517,60	-	2.804.
		70	990	474	566	4	9		823

Sumber: (Menteri Pertanian Republik Indonesia 2022)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perbedaan aloksi yang cukup besar dari tahun 2019 dengan 2020, dimana pada tahun 2019 jumlah alokasi pupuk bersubsidi cukup tinggi dibandingkan tahun 2020. Alokasi pupuk bersubsidi setiap tahunnya berbeda ini karena alokasi pupuk turun sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di masing-masing wilayah Desa maupun Kecamatan, hal ini yang akan menentukan ketepatan alokasi pupuk bersubsidi di tiap tahunnya.

Penyediaan pupuk bersubsidi didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan kebutuhan riil petani untuk satu periode dalam pengelolaan usahatani, selanjutnya RDKK digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur. Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani dengan dibantu oleh penyuluh lapangan. Sebagai sebuah program dengan target yang sangat luas,

implementasi subsidi pupuk menghadapi berbagai masalah dan kendala, yang mengakibatkan terjadinya penurunan efektivitas program.

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang penyediaan dan penyebarannya mendapat subsidi dari pemerintah. Kebijakan subsidi dan perputaran pupuk telah ditentukan pemerintah mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai kasus diantaranya kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga *actual* melebihi HET, dan margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu perencanaan alokasi

kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, disparitas harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran, kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi HET.

Petani membutuhkan suplai pupuk yang cukup, namun pada kenyataannya petani mengalami krisis pupuk setiap tahunnya. Masalah kelangkaan pupuk kerap sekali terjadi setiap tahun, hal ini terjadi secara terus menerus. Karena masih banyak yang belum memperoleh pupuk lebih tepatnya penyaluran yang belum tepat sasaran. Menjadikan para petani membeli pupuk yang non subsidi di pengecer, sedangkan harga dari pupuk non subsidi ini juga cukup lumayan mahal. Terkadang suplai yang ada di toko pengecer juga terbatas. Petani banyak berharap dengan pembelian pupuk non subsidi ini bisa menghasilkan hasil yang melimpah, untuk menutupi kerugian di musim

sebelumnya. Pemberian pupuk yang kurang konsisten akan mengakibatkan pertumbuhan yang tidak stabil, dari hal ini bisa dikatakan kemungkinan memperoleh hasil yang maksimal juga cukup sulit. Gagal panen menjadi sebuah ancaman bagi petani karena akan berpengaruh pada pendapatan petani dan juga ketahanan pangan, Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien.

Menurut Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, tidak benar terjadi pengurangan pupuk bersubsidi. Pemerintah melakukan alokasi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan ATR/BPN. "RDKK sesuai potensi perencanaan tanam di masing-masing wilayah desa dan kecamatan. Maka akan sangat menentukan ketepatan alokasi pupuk subsidi," jelas Kuntoro di Jakarta, Jumat (7/2).

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah mendalami kemungkinan penyalahgunaan pupuk subsidi, dan

ternyata ditemukan pupuk beralih pada perusahaan perkebunan (bukan petani), dan banyak juga petani perseorangan yang memperoleh pupuk bersubsidi meskipun bukan Kelompok Tani.

"Kami mengingatkan alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai RDKK. Makanya ada isu kelangkaan pupuk di masyarakat. Bagi yang tidak terdaftar, pupuk non subsidi tersedia banyak kok," tambahnya.

Kuntoro juga menjelaskan isu kelangkaan pupuk dan pengurangan pupuk di Jawa Timur hingga 50%, setelah ditelusuri, dijumpai fakta terjadi kelambatan pemerintah daerah menginput data kebutuhan melalui RDKK, akibat kurang cepat respon pada level kecamatan.

"Setiap bulannya, tanggal 20-25, pemerintah daerah dapat menginput kebutuhannya. Kami menghimbau agar lebih cepat diproses, agar tidak terjadi isu kelangkaan. Padahal pupuknya ada. Hanya petugasnya terlambat input sistem," tegas Kuntoro.

JEMBER, Bupati Jember Ir. H.

Hendy Siswanto, ST. IPU. bersama Kapolres Jember AKBP. Hery Purnomo dan Dandim 0824 Letkol. Inf. Batara C. Pangaribuan melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak ketersediaan pupuk bersubsidi maupun non subsidi, mulai dari gudang penyangga pupuk, distributor hingga agen resmi, Kamis (10/03/2022).

Sidak tersebut untuk memastikan proses penyaluran pupuk kepada para petani. Hasilnya, Bupati Hendy menemukan fakta bahwa ada perilaku yang menyimpang dimana petani mengambil jatah pupuk bersubsidi setahun dalam satu kali masa tanam.

"Jatah yang seharusnya untuk setahun, itu diambil sekaligus pada masa sekali masa tanam sehingga untuk masa tanam kedua, ketiga dan keempat ini akan bermasalah," ungkap Bupati Hendy membeberkan temuannya. Dia berharap perilaku demikian untuk disetop. "Itu tidak baik, saya harap ke depan tidak terjadi lagi seperti ini," pintanya.

Kebijakan pupuk bersubsidi sendiri juga mulai dipertanyakan oleh sebagian kalangan petani karena

selama ini subsidi yang diberikan dinilai masih kurang tepat sasaran. Permasalahan lain dalam subsidi pupuk yang juga mendapat banyak sorotan adalah masalah lemahnya pengawasan distribusi pupuk sehingga hampir setiap tahun terjadi kelangkaan pupuk dalam musim tanam.

Mempertimbangkan isu kebijakan subsidi pupuk yang masih diperdebatkan dan kebijakan penyaluran pupuk, maka dipandang perlu melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani agar para petani tidak terlalu bergantung kepada pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut penulis melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan memberikan pelatihan pembuatan pupuk fermentasi.

II. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pupuk Bersubsidi

(Menteri Perdagangan 2008)
Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, menyatakan Subsidi Pupuk adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan

dengan HET serta ditetapkan penyaluran resmi di Lini IV. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor. Pupuk yang bersubsidi diperuntukan bagi sektor pertanian atau sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijau pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.

(Menteri Pertanian 2011)
Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011, Pasal 2, menyatakan Sasaran pupuk bersubsidi adalah petani, yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 hektar. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan tanaman perikanan budidaya.

Sedangkan (Menteri Pertanian 2011) Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011, Pasal 1, menyatakan Petani adalah

perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.

Mengacu pada uraian diatas yang dimaksud dengan subsidi pupuk dalam penelitian ini adalah subsidi produksi yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggung sebagian besar biaya produksi pupuk agar bisa dicapai harga jual yang diinginkan. Subsidi pupuk yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah subsidi pupuk hanya kepada petani padi sawah. Secara Filosofis, Subsidi Pupuk dilakukan untuk membantu meringankan beban petani dalam membiayai usaha taninya. Selain persoalan biaya, petani juga memang menghadapi persoalan kemampuan dalam mengadopsi teknologi pemupukan untuk meningkatkan produktivitas.

2. Pengertian petani

Petani menurut (Hadiutomo 2012) adalah orang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lainnya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi. Petani dapat

dibedakan berdasarkan bentuk kegiatannya yaitu petani pemilik penggarap, petani penyewa, petani penyakap (penggarap), petani penggadai dan petani sebagai buruh tani. Sedangkan menurut (Rodjak 2006) petani merupakan unsur usaha tani yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, ia berperan sebagai pengelola usaha tani. Petani sering digambarkan sebagai individu yang bekerja disektor pertanian, penghasilannya sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Pemberdayaan para petani ini cukup rumit, hal ini didasarkan pada karakteristik petani yang kompleks (Anwas 2014).

Klasifikasi Petani menurut (Sastratmadja 2010), berdasarkan kepemilikan tanah, petani dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu:

- 1) Petani buruh atau buruh tani adalah petani yang sama sekali tidak memiliki lahan
- 2) Petani gurem adalah petani yang memiliki lahan sawah antara 0,1 sampai 0,50 hektar.
- 3) Petani kecil, adalah petani

yang memiliki lahan 0,51 sampai 1 hektar.

- 4) Petani besar, adalah petani yang memiliki lahan lebih dari satu hektar.

Golongan petani menurut Wahyudin (2005:39) di bagi menjadi tiga, berikut beberapa golongan petani yaitu:

- 1) Petani Kaya: yakni petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih.
- 2) Petani Sedang: petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha.
- 3) Petani Miskin: petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan berasal dari kata “*daya*” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “*berdaya*” yang artinya adalah memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat

sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan (Rosmedi dan Riza Risyanti 2006) dalam (Rohim, dkk 2022).

Pemberdayaan merujuk pada tingkat kemampuan seseorang, dalam hal ini khususnya pada kelompok-kelompok yang rentan dan lemah sehingga nantinya mereka mempunyai kemampuan atau kekuatan dalam:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar.
Maksudnya adalah orang atau kelompok mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b. Terjangkaunya sumber-sumber ekonomi yang produktif
Hal ini dapat berdampak pada orang atau kelompok daam meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;

- c. Ikut berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi. 2005)

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

World Bank dalam (Mardikanto 2015) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin) untuk mampu berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi pemberdayaan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekasaaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Beragam definisi pemberdayaan bisa memberikan gambaran bahwa pemberdayaan

merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Secara harfiah pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit.

Oleh karena itu kita harus menggali apa yang menjadi potensi masyarakat dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan

memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.

Pemberdayaan menunjuk pada suatu keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial diantaranya yaitu: masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam pemangku kebijakan atau

pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada kearifan lokal akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat juga difokuskan untuk penguatan individu baik anggota masyarakat maupun pranata-pranata masyarakat. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini yaitu menempatkan masyarakat bukan sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek atau pelaku pembangunan.

Program pemberdayaan masyarakat secara rasional harus melibatkan atau partisipasi dari masyarakat dengan porsi yang lebih besar, karena masyarakat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang harus dilakukan, namun pola pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberikan pendampingan dari instansi terkait pelaksanaan program kegiatan di lapangan sehingga program kegiatan

tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dari program pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu atau kelompok masyarakat menjadi individu atau kelompok yang mandiri. Maksud dari mandiri tersebut meliputi mandiri dalam berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka kerjakan. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Masyarakat yang mandiri adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh

lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

Tujuan utama dari program pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok rentan dan lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (Boateng, et.all. 2023). Berikut ini kriteria-kriteria kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah diantaranya adalah:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis;
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, serta masyarakat terasing;
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang

mengalami masalah pribadi atau keluarga.

III. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Masalah yang dihadapi oleh penulis di lokasi pengabdian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pola pikir atau *mindset*.

Pola pikir yang dimaksud penulis ada pola pikir dari petani yang menganggap bahwa dalam bertani itu untuk mendapatkan produktivitas tinggi yaitu dengan menggunakan pupuk kimia yang banyak. Semakin besar menggunakan pupuk maka akan mendapatkan hasil produktivitas yang tinggi. Padahal penggunaan pupuk berlebihan membuat kesuburan tanah akan berkurang. Disisi lain pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan pupuk bersubsidi sehingga terjadi kelangkaan di lapangan. Adanya pengurangan pupuk bersubsidi maka petani beralih menggunakan pupuk non subsidi yang harganya mencapai 3 kali lipat dari harga

pupuk subsidi. Sehingga hal ini akan menambah biaya produksi.

2. Laboratorium

Belum adanya laboratorium yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi tes kandungan pupuk fermentasi yang dibuat oleh petani. Hal ini membuat pesimis petani terkait produk yang sudah dibuat oleh petani. Jika ada laboratorium maka petani akan merasa yakin produknya bisa digunakan pada lahan yang diolah petani. Selain itu kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan pembuatan fermentasi.

IV. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan program PkM diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Merubah mindset masyarakat
Dalam program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tantangan paling berat adalah merubah pola pikir. Karena masyarakat itu bersifat pragmatis tidak terkecuali para

petani. Adanya pelatihan ini diharapkan agar para petani tidak tergantung lagi dengan pupuk kimia baik itu subsidi maupun non subsidi.

2. Mampu memproduksi pupuk sendiri

Penulis dalam PkM ini selain bertujuan untuk merubah mindset petani juga bertujuan agar petani mampu membuat pupuk bersubsidi dengan bahan-bahan yang mudah didapat disekitar petani baik itu sampah rumah tangga seperti air cucian beras (*leri*), buah nanas, air degan, gula aren maupun produk perusahaan yang sangat murah seperti EM4 untuk pertanian.

V. MANFAAT KEGIATAN

Adapun manfaat yang diperoleh oleh kelompok sasaran setelah adanya pelatihan pembuatan pupuk fermentasi ini adalah sebagai berikut:

1. Petani tidak bergantung penggunaan pupuk kimia
Adanya program ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap

penggunaan pupuk kimia. Karena dengan penggunaan pupuk fermentasi bisa mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.

2. Mengurangi biaya produksi pertanian

Maksud dari mengurangi biaya produksi pertanian disini adalah penggunaan pupuk kimia. Penulis membuktikan sendiri dengan cara melakukan tes *Part Per Million* (PPM) menggunakan alat TDS meter. Tujuan dari tes PPM untuk mengukur jumlah partikel terlarut pada air minum. Satuan yang digunakan TDS meter adalah ppm (Part Per Million) atau sepersepjuta bagian. Hasil pupuk fermentasi yang sudah dibuat lebih dari 2 kali lipat dari produk cair yang dibuat oleh perusahaan.

3. Meningkatkan pendapatan petani

Berkurangnya biaya produksi pertanian maka secara langsung akan meningkatkan pendapatan petani. Biaya produksi bisa dipangkas dan

bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain.

VI. Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan observasi awal disimpulkan bahwa solusi penyelesaian masalah utama yang dihadapi oleh petani adalah perlunya pemberdayaan kelompok tani melalui pelatihan pembuatan fermentasi sebagai solusi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia yang nantinya berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Ada tahapan kegiatan yang dilakukan, yaitu:

1. Tahap Observasi: Tim program melakukan observasi terhadap kelompok tani yang akan dibantu. Dari beberapa kelompok tani yang ada di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, penulis memilih “Kelompok Tani Sumber Rejeki 2”.
2. Tahap Sosialisasi: Setelah observasi, dilakukan sosialisasi mengenai program yang akan dilakukan. Tim menjelaskan manfaat pembuatan pupuk

fermentasi dan bagaimana cara pembuatannya yang sangat mudah dengan memanfaatkan bahan-bahan di sekitar petani.

3. Tahap Pelatihan: Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan atau praktek langsung pembuatan pupuk fermentasi.
4. Tahap Pendampingan: Setelah pelatihan, dilakukan pendampingan secara langsung kepada anggota kelompok tani.
5. Tahap Monitoring: Proses ini melibatkan pemantauan terhadap kemajuan dan penggunaan pupuk fermentasi dengan cara melakukan pengecekan tes PPM menggunakan TDS meter.
6. Tahap Evaluasi: Terakhir, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak program PkM terhadap mindset masyarakat maupun penggunaan pupuk fermentasi dalam bertani.

VII. KHALAYAK SASARAN

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dengan

mitra kelompok tani. Adapun identitas mitra sebagai berikut:

1. Nama : M. Murtadho
2. Jabatan : Ketua Kelompok Tani
3. Nama IRT/Kelompok :
Kelompok Tani
Sumber Rejeki 2
4. Bidang Kegiatan : Pertanian
5. Alamat : Desa Cangkring,
Kec. Jenggawah,
Kab. Jember

Pemilihan mitra tersebut berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan bahwa terdapat beberapa permasalahan pada mitra sehingga memerlukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk menyelesaikan permasalahannya.

VIII. METODE KEGIATAN

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh ketua pelaksana dan mahasiswa KKN Kolaborasi STIA Pembangunan, diantaranya:

1. Observasi
Kegiatan observasi dilakukan untuk menganalisis situasi atau permasalahan yang ada pada

mitra sebagai dasar menyusun program dan kegiatan untuk

menyelesaikan masalah.



2. Permohonan ijin kepada mitra
Ketua pelaksana mengajukan surat permohonan kepada Bapak M. Murtadho untuk bersedia menjadi mitra dalam kegiatan ini. Bapak M. Murtadho bersedia untuk bekerja sama dalam kegiatan ini yang ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan kesediaan kerja sama program pengabdian kepada masyarakat yang bermaterai.
 - a. Tahap sosialisasi tentang pentingnya penggunaan pupuk fermentasi sebagai alternatif langkanya pupuk bersubsidi dan mahalnnya pupuk non subsidi bersama ketua kelompok tani sumber rejeki 2.
 - b. Tahap pelatihan tentang pembuatan pupuk fermentasi dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: air cucian beras (leri), gula merah atau aren, air kelapa, buah nanas, EM4, pupuk 16-16-16. Kegiatan ini dilaksanakan oleh ketua pelaksana program dan mahasiswa.
3. Pelaksanaan
 - a. Tahap sosialisasi tentang pentingnya penggunaan



c. Tahap pendampingan program kegiatan. Tim pendampingan melibatkan proses yang intensif dan terarah untuk membantu anggota kelompok usaha menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh selama pelatihan ke dalam kegiatan operasional sehari-hari. Melalui sesi-sesi tatap muka yang mendalam, tim

melakukan pengecekan hasil fermentasi PPM dengan menggunakan TDS meter.

d. Tahap monitoring dan evaluasi yang dilakukan 3 Desember 2023 tentang produk yang sudah ada di meta platform dan telah dipasarkan yang di dampingi oleh ketua pelaksana



IX. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi kegiatan ini dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk fermentasi yang dilakukan oleh ketua pelaksana dan peserta KKN Tematik Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dapat menghasilkan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Capaian Mitra

No.	Indikator Capaian Mitra	Sebelum	Sesudah
1	Mindset petani	Fanatik atau ketergantungan menggunakan pupuk kimia baik subsidi maupun non subsidi	Tidak fanatik atau tidak ketergantungan lagi menggunakan pupuk kimia baik subsidi maupun non subsidi
2	Biaya produksi pertanian	Sangat tinggi khususnya penggunaan pupuk kimia	Berkurang signifikan biaya pembelian pupuk kimia
3	Pendapatan petani	Sedikit karena biaya produksi yang mahal, salah satunya dari segi pembelian pupuk kimia	Pendapatan petani meningkat Sedikit karena petani mampu menekan pengeluaran pembelian pupuk kimia
4.	Kesuburan tanah	Tanah rentan berkurang kesuburan karena penggunaan pupuk	Kesuburan tanah meningkat karena unsur hara terjaga dari residu

No.	Indikator Capaian Mitra	Sebelum	Sesudah
		kimia yang berlebih	penggunaan pupuk kimia

Sumber: Pelaksanaan program (2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Boateng, Sheena Lovia, Richard Boateng, and Thomas Anning-Dorson. 2023. "Empowering Women in the Digital Economy." in *Empowering Women in the Digital Economy*.
- BPS. 2022. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2020-2022." *Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- Edi., Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Ravika Adimatama.
- Hadiutomo, K. 2012. *Mekanisasi Pertanian*. Bogor: IPB Press.
- Mardikanto, T. dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Menteri Perdagangan. 2008. *Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008*. Jakarta.
- Menteri Pertanian. 2011. *Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011, Pasal 2*. Jakarta.
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*. Jakarta.
- Rodjak, Abdul. 2006. *Manajemen Usaha Tani*. Bandung: Pustaka Gratuna.
- Rohim, Asmuni, Muttaqin, M. Zaenul Muttaqin. 2022. *Problematika Dan Kisah Sukses Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Kesatu. Yogyakarta: Deepublish.
- Rosmedi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Sastraatmadja. 2010. *Suara Petani*. Bandung: Penerbit Masyarakat Geografi Indonesia.